

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Ika Inayah

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Alamat: Kampus BRIN Kawasan Gatot Subroto Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: ikai002@brin.go.id

Abstract. As a country with the potential and rich natural resources, agricultural sector in a broad sense is an important sector in driving economic growth in Indonesia. Gross domestic product (GDP) as an indicator of economic growth shows an increasing trend every year in 2011-2019. GDP of agricultural sector has also increased every year. However, government spending in this sector tends to decrease. Therefore, the purpose of this study is to analyze the effect of government spending on agriculture sector on economic growth in Indonesia. This study uses multiple regression analysis with the Ordinary Least Square (OLS) approach using time series data for 2011-2019. Dependent variable is GDP at constant prices and independent variables are government expenditure in the food crops, horticulture, plantation, animal husbandry, agricultural and hunting services, forestry, and fisheries subsectors. The results show that government spending on the food crops, estate crops and fisheries subsectors had a significant and negative effect on Indonesia's GDP at a real level of 5%. The government expenditure in the agriculture and hunting services subsector as well as forestry and logging has a significant and positive effect on Indonesia's GDP.

Keywords: agriculture, economic growth, government expenditure, GDP

Abstrak. Sebagai negara yang memiliki potensi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Produk domestik bruto (PDB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat di tiap tahunnya dalam rentang tahun 2011-2019. PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pun juga mengalami peningkatan tiap tahun. Namun, pengeluaran pemerintah di sektor ini cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) menggunakan data time series tahun 2011-2019. Variabel dependen yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan dan variabel independennya adalah pengeluaran pemerintah pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan, dan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PDB Indonesia pada taraf nyata 5%. Adapun pengeluaran pemerintah pada subsektor jasa pertanian dan perburuan serta kehutanan dan penebangan kayu berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, PDB, pertanian, pertumbuhan ekonomi

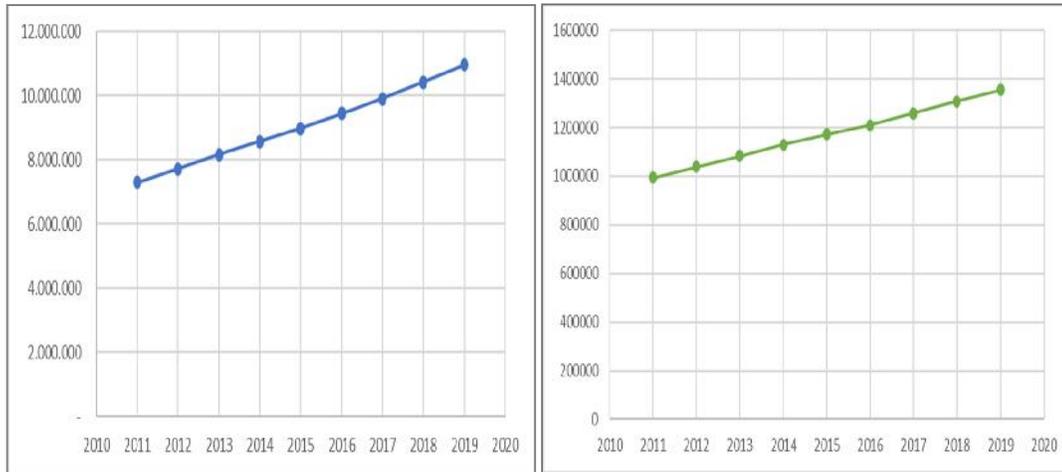
LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan ke arah kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Implikasi adanya pertumbuhan ekonomi disuatu negara merupakan wujud berhasilnya pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kuznets dalam Jhingan (2002) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya.

Tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah melalui pengukuran produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Oleh karena itu, indikator PDB dapat dijadikan sebagai indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di suatu negara.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian dalam arti luas menjadi sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Peran sektor ini dapat dilihat melalui kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan, pakan, energi, bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan sebagai sumber pendapatan negara melalui kegiatan ekspor.

Perkembangan PDB Indonesia tahun 2011-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan tren yang positif atau terus meningkat di tiap tahunnya (Gambar 1). Tren PDB yang terus meningkat ini juga terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam rentang 10 tahun terakhir. Sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap terhadap PDB Indonesia, yaitu sekitar 13% (BPS, 2020).



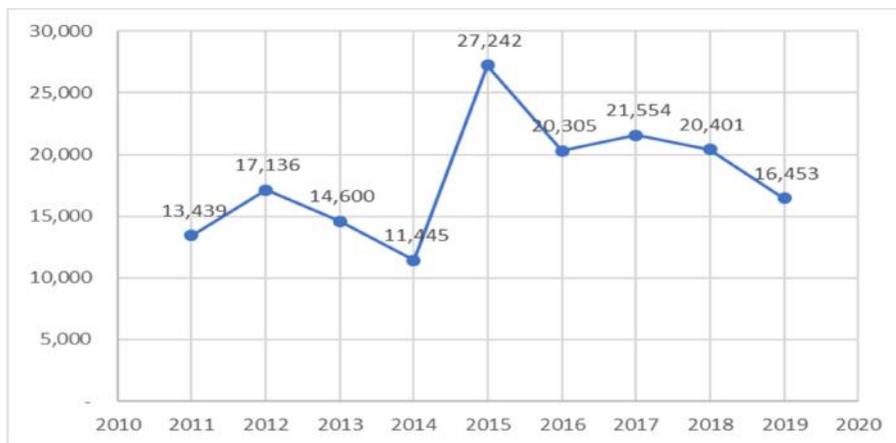
Sumber: BPS, 2020

Gambar 1. Perkembangan PDB Indonesia (a) dan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2011-2020 (Milyar Rp)

Terdapat empat komponen dalam perekonomian yang dijadikan sebagai komponen dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu: konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam perekonomian suatu negara. Pengeluaran pemerintah merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan negara baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang seimbang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun jika pengeluaran pemerintah tidak proporsional akan memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu negara (Sodik, 2007). Oleh karena itu, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting untuk dianalisis.

Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam rentang waktu 9 tahun terakhir. Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah di sektor ini terjadi di dua tahun yaitu di tahun 2012 dan

meningkat secara tajam di tahun 2015. Adapun penurunan jumlah pengeluaran pemerintah di sektor ini terjadi dalam dua periode. Periode pertama yaitu pada tahun 2013-2014 dengan penurunan dari Rp 17.136 milyar ke Rp 11.445 milyar atau turun sebesar Rp 5.691 milyar. Periode kedua terjadi pada tahun 2016-2019 dengan penurunan dari Rp 27.242 milyar ke Rp 16.453 milyar atau turun sebesar Rp 10.789 milyar. Pengeluaran pemerintah yang berfluktuatif dengan kecenderungan menurun ini tidak searah dengan pertumbuhan PDB total dan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cenderung naik di tiap tahunnya. Padahal, menurut beberapa penelitian sebelumnya, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Swaramarinda & Indriani, 2011; Zahari, 2017; Sitaniapessy, 2013; Haryanto, 2013; Anggraeni, 2017).



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 2. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2011-2019 (Rp Milyar)

Oleh karena itu, tujuan peneliiian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat menginterpretasikan sebuah pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka dapat dikatakan bahwa semakin cepat proses penambahan output di wilayah tersebut sehingga prospek perkembangan wilayah tersebut semakin baik. Sehingga sebuah negara harus mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi untuk dapat menentukan menentukan sektor prioritas pembangunan.

Menurut Adam Smith pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah tersebut diperlukan kebijakan anggaran dengan baik dan mekanisme penyelenggaraan anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang direncanakan oleh suatu negara.

Menurut Todaro (2003) terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*) yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia, pertumbuhan penduduk (*growth in population*) yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang, dan kemajuan teknologi (*technological progress*).

Menurut Kuznets (1965) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dalam kemampuan dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dipengaruhi adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai kebutuhan dan kondisi yang ada.

Menurut Sukirno Sadano (2004), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kinerja makro yang sangat populer, dan dalam hitungannya

merupakan derivasi dari PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product).

Produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan PDB ini, termasuk produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari PDB dianggap bersifat bruto/kotor. (Sukirno, 2000).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari PDB antara lain adalah :

- a. PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.
- c. PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

- e. PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
- f. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- g. PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
- h. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk.
- i. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Menurut Nopirin (2008), ada tiga pendekatan yang bisa digunakan dalam menghitung PDB yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1) Pendekatan Produksi

PDB dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas dan air bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, hotel dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)

2) Pendekatan Pengeluaran

PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah dengan menjumlahkan komponen permintaan akhir meliputi $C + I + G + X - M$

Keterangan:

C = Consumption atau pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

I = Investment atau perubahan inventori dalam suatu periode

G = Government atau konsumsi pemerintah atas barang atau jasa

X-M = Export – Import atau Export neto merupakan ekspor dikurangi impor

3) Pendekatan Pendapatan

PDB dengan pendekatan pendapatan meliputi komponen balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Pengeluaran Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada

rakyat. Adapun fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adapun fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Murni (2006) mengatakan pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi suatu negara mempunyai peran sebagai berikut yaitu mengatur kegiatan ekonomi melalui perundang-undangan dan peradilan, mengendalikan kestabilan ekonomi dalam arti mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, menjaga keamanan dan ketahanan suatu negara baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mulyadi (2001) berpendapat bahwa anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran menjadi sangat penting bagi suatu organisasi karena merupakan sebuah rencana yang tertulis mengenai kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu M. Nafarin (2009).

Menurut Munandar (2004), anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Mardiasmo (2008) berpendapat bahwa anggaran sektor publik penting karena anggaran merupakan alat bagi pemerintahan untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber data (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*. Anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam, hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Anggaran juga mempunyai manfaat seperti yang dikemukakan oleh nafarin (2009), yaitu segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotivasi pegawai, menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai, menghindari pemborosan pembayaran yang kurang perlu, sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, dan alat pendidikan bagi para manajer atau pemimpin.

Anggaran Belanja pada APBN dirinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun klasifikasi fungsi, APBN dikelompokkan menjadi 11 fungsi, yaitu: Pelayanan Umum; Pertahanan; Ketertiban dan Keamanan; Ekonomi; Perlindungan Lingkungan Hidup; Perumahan dan Pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan Budaya; Agama; Pendidikan; dan Perlindungan Sosial.

Masing-masing fungsi tersebut dirincikan lagi ke dalam sub fungsi. Khusus Fungsi ekonomi, terdiri dari sub fungsi: perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, dan UKM; tenaga kerja; pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan; pengairan; bahan bakar dan energi; pertambangan; industri dan konstruksi; transportasi; telekomunikasi dan informatika; penelitian dan pengembangan ekonomi; dan ekonomi lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dengan rentang tahun 2011-2019. Data yang digunakan meliputi data anggaran pemerintah di sektor pertanian yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan data produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika. Adapun lingkup sektor pertanian dalam penelitian ini terdiri dari subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, serta perikanan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan pendekatan Model Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Square*) menggunakan software Eviews 10. Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen adalah PDB atas dasar harga konstan tahun 2010, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah anggaran pemerintah pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan, dan perikanan. Data yang digunakan ditransformasikan kedalam bentuk logaritma natural (ln), sehingga model ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\ln PDB = b_0 + b_1 \ln Pang + b_2 \ln Hort + b_3 \ln Keb + b_4 \ln Tern + b_5 \ln J_Tani + b_6 \ln Hut + b_7 \ln Ik + e$$

dengan keterangan:

PDB = Produk Domestik Bruto (PDB)

Pang = Anggaran pemerintah subsektor tanaman pangan

Hort = Anggaran pemerintah subsektor tanaman hortikultura

Keb = Anggaran pemerintah subsektor tanaman perkebunan

Tern = Anggaran pemerintah subsektor peternakan

J_Tani = Anggaran pemerintah subsektor jasa pertanian dan perburuan

Hut = Anggaran pemerintah subsektor kehutanan dan penebangan kayu

Ik = Anggaran pemerintah subsektor perikanan

b_0 = Intersep

b_n = Parameter yang diduga

e = Galat/error

Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang digunakan:

- a. Anggaran pemerintah di sektor pertanian yang digunakan adalah anggaran APBN Indonesia untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2011-2019 (Rp).
- b. PDB yang digunakan adalah perkembangan PDB total Indonesia atas dasar harga konstan 2010 dengan rentang tahun 2011-2019 (Rp).
- c. Harga konstan adalah penilaian perhitungan PDB yang dilakukan dengan harga satu tahun dasar tertentu, yang dinamakan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), pada penelitian ini menggunakan tahun dasar 2010.

Berdasarkan model tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H1: Anggaran pemerintah di subsektor tanaman pangan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

H2: Anggaran pemerintah di subsektor tanaman hortikultura memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

H3: Anggaran pemerintah di subsektor tanaman perkebunan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

H4: Anggaran pemerintah di subsektor peternakan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

H5: Anggaran pemerintah di subsektor jasa pertanian dan perburuan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

H6: Anggaran pemerintah di subsektor kehutanan dan penebangan kayu memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

H7: Anggaran pemerintah di subsektor perikanan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji bertujuan untuk mengetahui atau menguji koefisien regresi suatu variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi ceteris paribus. Nilai t-hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-tabel pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat kepercayaan 95 persen atau taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ (0,05) akan dapat diperoleh hasil dengan kategori sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($\alpha = 0,05$) maka tolak H_0 (pada Eviews, nilai probabilitas/p-value $< 0,05$), yang berarti: anggaran pemerintah di subsektor pertanian tertentu (masing-masing subsektor pertanian yang diteliti) berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($\alpha = 0,05$) maka tidak tolak H_0 (pada Eviews, nilai probabilitas/p-value $> 0,05$), yang berarti: anggaran pemerintah di subsektor pertanian tertentu (masing-masing subsektor pertanian yang diteliti) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia

Uji Determinasi dengan Koefisien Determinasi (R^2) perlu dilakukan untuk memberikan informasi baik atau tidak model regresi yang diperoleh dari hasil estimasi. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan besaran variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Rentang nilai koefisien ini antara 0 dan 1, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan nol ($R^2=0$) artinya variasi dari variabel dependen tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel independen digunakan.
- b. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu ($R^2=1$) artinya variasi dari variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independen yang digunakan.

Menurut Ghozali, (2011) Jika variabel independen yang digunakan pada penelitian > 2 variabel, maka koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji t-statistik pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, serta perikanan berpengaruh secara signifikan terhadap PDB Indonesia pada taraf nyata 5%. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas t-statistik seluruh variabel tersebut lebih kecil dari taraf nyata 5% ($< 0,05$). Adapun pengeluaran pemerintah pada subsektor tanaman hortikultura dan peternakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

Tabel 1. Hasil analisis regresi pengaruh anggaran sektor pertanian terhadap PDB Indonesia

Variabel	Koefisien	Standard error	t-Statistik	Probabilitas
C (b ₀)	47.41723	0.807425	58.72648	0.0108**
Pangan (Pang)	-0.275432	0.018311	-15.04151	0.0423**
Hortikultura (Hort)	0.007297	0.026699	0.273302	0.8302
Perkebunan (Keb)	-0.316724	0.019036	-16.63826	0.0382**
Peternakan (Tern)	0.021063	0.018364	1.146945	0.4565
Jasa Pertanian dan Perburuan (J_tan)	0.758517	0.045976	16.49826	0.0385**
Kehutanan dan Penebangan (Hut)	0.466976	0.019577	23.85290	0.0267**
Perikanan (Ik)	-1.022681	0.050792	-20.13468	0.0316**
<i>R-squared</i>	0.999760			
<i>Adjusted R-squared</i>	0.998083			
Prob (F-statistik)	0.031526**			

Keterangan: **) nyata pada taraf 5%

Sumber: author, diolah

Nilai koefisien determinasi (adjusted R²) dari hasil estimasi model sebesar 0.998083 yang mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa variabel independen dari sektor pertanian yang digunakan dalam penelitian ini dapat menerangkan variasi dari variabel dependen PDB Indonesia

Berikut adalah hasil estimasi persamaan pengaruh anggaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDB Indonesia.

$$\ln \text{PDB} = 47.41723 - 0.275432 \ln \text{Pang} - 0.316724 \ln \text{Keb} + 0.758517 \ln \text{J_Tani} + 0.466976 \ln \text{Hut} - 1.022681 \ln \text{Ik} + e$$

Subsektor Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap PDB Indonesia pada taraf nyata 5%, *ceteris paribus*. Nilai koefisien subsektor ini sebesar -0.275432 yang menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan anggaran pemerintah di subsektor tanaman pangan sebesar 1% akan menaikkan PDB Indonesia sebesar 0.275432%. Pengaruh signifikan dan negatif ini didukung dengan penelitian yang ditemukan Folster dan Henrekson (1999) yang menunjukkan adanya dampak negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. PDB Harga Konstan dan Anggaran Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2011 – 2019 (Rp triliun)

Tahun	PDB HK Total	Anggaran Subsektor Tanaman Pangan
2011	7.287,64	2,98
2012	7.727,08	4,40
2013	8.156,50	2,65
2014	8.564,87	2,22
2015	8.982,52	2,76
2016	9.434,61	5,37
2017	9.912,93	6,80
2018	10.425,40	6,69
2019	10.949,24	5,36

Sumber: BPS dan <http://bi.anggaran.depkeu.go.id>, diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran di subsektor pertanian yang secara alokasi yang menurun dari tahun ke tahun pada tahun periode 2012 – 2014 dan periode 2017 – 2019, tetapi pelaksanaan anggaran pada subsektor ini dapat dikatakan efektif dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan PDB Indonesia disaat alokasi anggarannya berkurang.

Subsektor Tanaman Perkebunan

Hasil estimasi pada subsektor tanaman perkebunan juga memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap PDB Indonesia pada taraf nyata 5%. Nilai koefisien subsektor ini sebesar -0.316724 menunjukkan bahwa PDB Indonesia akan meningkat sebesar 0.316724% jika terjadi penurunan anggaran pemerintah di subsektor tanaman perkebunan sebesar 1%, ceteris paribus. Pengaruh signifikan dan negatif tersebut sama dengan penelitian yang ditemukan Folster dan Henrekson (1999) yang menunjukkan adanya dampak negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 3. PDB Harga Konstan dan Anggaran Subsektor Tanaman Perkebunan
Tahun 2011 – 2019 (Rp triliun)**

Tahun	PDB HK Total	Anggaran Subsektor Tanaman Perkebunan
2011	7.287,64	1,52
2012	7.727,08	1,25
2013	8.156,50	1,31
2014	8.564,87	1,05
2015	8.982,52	3,42
2016	9.434,61	1,04
2017	9.912,93	0,94
2018	10.425,40	1,42
2019	10.949,24	1,07

Sumber: BPS dan <http://bi.anggaran.depkeu.go.id>, diolah

Tabel 3 memperlihatkan bahwa selama periode 2011 – 2019 terjadi penurunan anggaran sebanyak lima kali yaitu pada tahun 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2019. Sedangkan kenaikan anggaran hanya terjadi sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2013, 2015, dan 2018. Adanya penurunan anggaran atau efisiensi anggaran tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran program di subsektor tanaman perkebunan dilakukan secara efektif dengan tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

Subsektor Jasa Pertanian Dan Perburuan

Adapun subsektor jasa pertanian dan perburuan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia pada taraf nyata 5%. Peningkatan anggaran pemerintah di subsektor jasa pertanian dan perburuan sebesar 1% akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0.758517%. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ram (1986).

Tabel 4. PDB Harga Konstan dan Anggaran Subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan Tahun 2011 – 2019 (Rp triliun)

Tahun	PDB HK Total	Anggaran Subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan
2011	7.287,64	3,35
2012	7.727,08	3,95
2013	8.156,50	3,48
2014	8.564,87	2,90
2015	8.982,52	11,97
2016	9.434,61	6,87
2017	9.912,93	6,36
2018	10.425,40	5,12
2019	10.949,24	4,01

Sumber: BPS dan <http://bi.anggaran.depkeu.go.id>, diolah

Hal ini terlihat karena adanya kenaikan anggaran yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 sebesar hampir 500% dari tahun sebelumnya. Walaupun di tahun 2016 terjadi penurunan hampir 50%, tetapi pola anggaran dari tahun 2011 sampe 2019 cenderung meningkat (Tabel 4). Kecenderungan meningkat ini berdampak positif terhadap PDB Indonesia dengan pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal.

Subsektor Kehutanan Dan Penebangan Kayu

Subsektor kehutanan dan penebangan kayu juga memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia. PDB Indonesia akan meningkat sebesar 0.466976% jika terjadi peningkatan anggaran pemerintah di subsektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar 1%. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan hasil penelitian Ram (1986).

Tabel 5. PDB Harga Konstan dan Anggaran Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Tahun 2011 – 2019 (Rp triliun)

Tahun	PDB HK Total	Anggaran Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu
2011	7.287,64	0,42
2012	7.727,08	0,71
2013	8.156,50	0,80
2014	8.564,87	0,59
2015	8.982,52	0,69
2016	9.434,61	0,61
2017	9.912,93	0,73
2018	10.425,40	1,02
2019	10.949,24	0,67

Sumber: BPS dan <http://bi.anggaran.depkeu.go.id>, diolah

Tabel 5 menunjukkan adanya kenaikan anggaran sebanyak lima kali pada periode 2011 – 2019 yaitu tahun 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 sedangkan penurunan anggaran hanya terjadi 3 kali yaitu tahun 2014, 2016, 2019. Adanya kenaikan anggaran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kenaikan PDB menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran yang bertambah terbukti efektif dan dapat dilaksanakan secara optimal pada subsektor kehutanan dan penebangan kayu.

Subsektor Perikanan

Subsektor perikanan memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap PDB Indonesia. Penurunan anggaran pemerintah di subsektor perikanan sebesar 1% akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 1.022681%. Pengaruh signifikan dan negatif tersebut sejalan dengan dampak negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diteliti oleh Folster dan Henrekson (1999).

Tabel 6. PDB Harga Konstan dan Anggaran Subsektor Perikanan Tahun 2011 – 2019 (Rp triliun)

Tahun	PDB HK Total	Anggaran Subsektor Perikanan
2011	7.287,64	2,67
2012	7.727,08	3,49
2013	8.156,50	3,58
2014	8.564,87	2,90
2015	8.982,52	5,60
2016	9.434,61	3,99
2017	9.912,93	3,84
2018	10.425,40	3,19
2019	10.949,24	2,43

Sumber: BPS dan <http://bi.anggaran.depkeu.go.id>, diolah

Dari tabel 6 dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan alokasi sebanyak 6 kali selama periode 2011 s.d. 2019 yaitu pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 sedangkan kenaikan anggaran terjadi hanya sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2012 dan 2015. Penurunan anggaran sebanyak 6 kali tersebut ternyata dapat meningkatkan PDB Indonesia. Hal ini berarti dengan terjadinya penurunan anggaran, subsektor perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengeluaran pemerintah di subsektor jasa pertanian dan perburuan dan subsektor kehutanan dan penebangan kayu memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia. Sedangkan pengeluaran pemerintah di subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman perkebunan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap PDB Indonesia. Hal yang berbeda juga terjadi pada pengeluaran pemerintah di subsektor tanaman hortikultura dan subsektor peternakan yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia.

Dengan adanya pengaruh anggaran yang berbeda-beda diantara subsektor tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai proporsi alokasi anggaran pengeluaran pemerintah yang efisien dan efektif di masing-masing sektor agar dapat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, M. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1970-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(5), 499-509.
- Badan Pusat Statistika. (2020). Produk domestic bruto menurut lapangan usaha. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3>.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Haryanto, T.P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148-158.
- Jhingan, M.L. (2002). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kementerian Keuangan. (2020). Pengeluaran pemerintah di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Tersedia pada: <http://bi.anggaran.depkeu.go.id>.
- Kuznets, S. (1965). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Balai Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: PT. Andi.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, Edisi ke-3*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Munandar, M. (2010). *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Nafarin, M. (2009). *Penganggaran Perusahaan Edisi ke-3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nijkamp, Peter, Poot, J. (2003). Meta-analysis of the impact of fiscal policies on long-run growth. *Discussion Paper TI2002-028/3 (March 2003 version) forthcoming in European Journal of Political Economy*. Amsterdam: Tinbergen Institute.
- Nopirin. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Edisi ke-1*. Yogyakarta: BPFE.
- Prayitno. (1985). *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta: Liberti.
- Ram, R. (1986). Government size an economic growth: A new framework and some evidence from cross-section and time-series data. *The American Economic Review*, 76(1), 191-203.
- Siagian. (1984). *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Sinha. (2000). Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia. *Journal of Economic Development*, 23(2), 71-80.
- Sitaniapessy, H.A.P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1), 38-51.

- Sjoberg. (2003). Government Expenditure Effect on Economic Growth the Case of Sweden 1960-2001. *Working Paper*. World Bank.
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional: studi kasus data panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 27-36.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFEUI.
- Swaramarinda, D.R., Indiriani, S. (2011). Pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Econosains*, 9(2), 95-105.
- Tang, T.C. (2003). Wagner's Law versus Keynesian Hypothesis in Malaysia: An Impressionistic View. *Discussion Paper in Department of Economics No.1441-5249*. Selangor: Monash University Malaysia.
- Todaro, M.P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi ke-8*. Jakarta: Erlangga.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, 1(1), 180-196.